

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUPANG

Imelda R. Nayuf^{1*}, Agnes K. B. Mudamakin², Fransiscus N. Naiola³ dan Christian T. Peilouw⁴

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: ImeldaNayuf@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much the ability of local revenue in financing the regional expenditure of Kupang Regency. This research has the benefit of increasing knowledge about how big the level of Local Original Income of the Kupang Regency Government is. The research method used in this research is quantitative. The data analysis technique used in this study is by using the formula for the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, analysis of the regional financial dependence ratio, the effectiveness ratio of the PAD, and the regional financial efficiency ratio. The results obtained from this study are the financial capacity management of Kupang Regency measured from the level of regional autonomy included in the very poor criteria and the level of regional financial independence ratio was very low. The effectiveness ratio is less effective with an average of 80%, the efficiency ratio level is an average of 99.98%, where in 2017 the percentage is 106.92%, in 2018 the percentage is 98.77%, in 2019 the percentage is 96, 55%, in 2020 the percentage is 97.76% and the spending growth ratio is 6.48% on average. Where in 2017 the percentage was 14.95%, in 2018 the percentage was 1.03%, in 2019 the percentage was 4.24%, in 2020 the percentage was 5.70%.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Financial Independence, PAD Effectiveness Ratio

PENDAHULUAN

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu elemen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No 32 Tahun 2004) tentang pemerintah daerah,

pendapatan daerah berasal dari pemerintah dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain PAD yang sah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan otonomi daerah kota dan kabupaten berdasarkan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh adanya sumber dana yang pasti. Otonomi daerah dilakukan berdasarkan desentralisasi, yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah pendapatan asli daerah dalam suatu daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil bumi dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terdapat total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan

penyelenggaraan otonomi daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Ukuran kemampuan daerah terletak pada pendapatan asli daerahnya, dimana PAD merupakan cerminan kemampuan daerah yang perlu digali dan terus ditumbuh kembangkan untuk kesinambungan pembangunan dalam pelaksanaan APBD. Kabupaten Kupang termasuk salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang mempunyai PAD untuk mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memaksimalkan segala potensi sumber daya lokalnya. Pemaksimalan sumber daya lokal yang ada, dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dengan memaksimalkan penerimaan daerahnya dari sumber-sumber yang sudah ada. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan PAD yaitu memperluas basis sumber penerimaan dengan cara menentukan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Berikut ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Kupang yang tersaji pada tabel 1.

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan dan realisasi anggaran belanja pada pemerintah daerah kabupaten kupang pada tahun 2017-2020 persentase antara pendapatan dan belanja terjadi fluktuasi di mana pada tahun 2017 pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dari pendapatan sebesar 6,92%, pada tahun 2018 pemerintah daerah melakukan belanja lebih kecil dari pendapatan sebesar 1,23%, pada tahun 2019 pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dari

pendapatan sebesar 9,16% dan pada tahun 2020 pemerintah daerah melakukan belanja lebih kecil dari pendapatan sebesar 2,24%. Hal ini dapat menyebabkan inflasi pada pemerintah daerah kabupaten kupang sehingga butuh kajian yang mendukung untuk mencegah terjadi inflasi tersebut.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya fluktuasi anggaran pendapatan dan belanja adalah Pada belanja pegawai realisasinya tidak mencapai target akibat adanya pegawai yang pensiun pada tahun tersebut maupun ada pegawai yang pindah atau meninggal dunia, Pada belanja modal realisasinya berdasarkan kebutuhan kantor sehingga tidak menentu kebutuhan anggarannya, Pada belanja bantuan sosial seperti bantuan barang atau jasa maupun bantuan langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat setiap tahunnya tidak sama sehingga hanya berdasarkan kebutuhan dilapangan, Pada belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan rutin dan juga harga barang atau jasa tidak menentu setiap tahunnya.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah kabupaten Kupang karena pemerintah daerah kabupaten kupang merupakan salah satu daerah otonomi yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam membiayai belanjanya dengan menggunakan pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menguji kembali penelitian tentang analisis kemampuan pendapatan daerah dalam membiaya belanja daerah yang telah banyak dilakukan, namun mempunyai hasil yang berbeda-beda (Wenur, 2013; Tamboto et al, 2014; Manggu., 2019; Viara, 2018; Patiroi, 2020).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah pada Kabupaten Kupang".

Tabel 1. Laporan Anggaran Realisasinya Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang T.A 2017-2020.

Tahun	Anggaran realisasi Pendapatan	Anggaran Realisasi Belanja	Selisih (%)
2017	1.141.086.051.763,62	1.220.109.670.345,00	6,92
2018	1.236.846.999.491,25	1.221.688.581.122,00	(1,23)
2019	1.255.056.325.353,64	1.211.863.528.921,00	9,16
2020	1.175.919.370.060,51	1.149.687.557.091,39	(2,24)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah pada Kabupaten Kupang tahun 2017-2020. Data kualitatif yang diperoleh dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kupang adalah sejarah kantor dan struktur organisasi yang ada. Data kuantitatif yang diperoleh dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kupang adalah laporan keuangan tahun anggaran 2017-2020 Instansi Pemerintah Kabupaten Kupang.

Data yang digunakan data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen pustaka (Sugiyono, 2012). Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber secara langsung pada BPKAD Kabupaten Kupang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data LRA dari tahun anggaran 2017-2020 yang dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Kupang.

Teknis analisis data menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal milik Mahmudi (2010). Derajat Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Interval	Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Teknis analisis data kedua menggunakan rasio Kemandirian milik Halim (2012). Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat/daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keu. Daerah

Interval (%)	Kemandirian Daerah
0 - 25	Rendah Sekali
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
>75 - 100	Tinggi

Teknis analisis data ketiga menggunakan Rasio Efektivitas PAD milik Mahmudi (2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Teknis analisis data ke empat menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah milik Mahmudi (2019). Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Teknis analisis data ke limamenggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja milik Mahmudi (2019). Pertumbuhan Belanja Thn t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

Mengingat masih lemahnya kemampuan daerah pada Kab Kupang dalam menggali sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri maka penggunaan belanja modal harus difokuskan pada program yang secara berkesinambungan yang dapat mendukung peningkatan, memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan merangsang terciptanya sumber pendapatan baru. Perlu dilakukan pengkajian untuk mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk membiayai belanja daerah pada Kab. Kupang terutama pengeluaran pembangunan. Hal ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kab Kupang dalam mengelola keuangan daerahnya agar tepat dan berhasil. Untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah peneliti menggunakan rasioderajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat sebuah model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan. Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Menurut tabel 5 Derajat desentralisasi Kabupaten Kupang menunjukkan angka rata-rata 7,83% dimana dapat di katakan pemerintah daerah kabupaten Kupang sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Artinya semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dalam empat tahun terakhir derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 11,74%, di tahun 2019 dengan 6,80%, tahun 2018 dengan 6,64%, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 5,91%.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan tabel 6, maka diperoleh informasi rasio Analisis kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang menunjukan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini di tunjukan dari rata-rata rasio kemandirian sebesar 10,06% yang artinya semakin rendah angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin rendah kemandirian keuangan daerahnya. Presentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 15,36% dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 7,91%.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas PAD tabel 7 di anggap sangat efektif apabila rasio ini mencapai angka 100%, sedangkan dianggap efektif apabila berada pada presentase 100%, cukup efektif jika presentase 90%-99%, kurang efektif jika presentase 75%-89%. Berdasarkan informasi rasio efektifitas di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang dapat dinilai secara rata-rata Kurang Efektif. Rata-rata rasio efektifitas PAD dari tahun 2017-2020 sebesar 80,12%. Jika di lihat dari Presentase tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 tergolong kurang efektif dengan masing-masing presentase 83,86%, 77,64%, dan 70,98%, sedangkan untuk tahun 2020 tergolong cukup efektif dengan presentase 93,90%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah. kinerja pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi belanja dikategorikan efisien apabila rasio dicapai dibawah 100%.

Efisiensi keuangan daerah tersaji pada tabel 8, secara rata-rata pemerintah daerah sudah melakukan efisiensi keuangan daerah dengan persentase 99,98%. Artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi belanja dikategorikan efisien apabila rasio dicapai dibawah 100%. Namun pada tahun 2017 pemerintah daerah belum mampu melakukan efisiensi keuangan daerah karena masih masih di atas 100% yaitu dengan persentase 106,92%. Pada tahun 2018-2020 pemerintah daerah kabupaten kupang sudah mampu melakukan efisiensi keuangan daerah karena masing-masing persentase tidak mencapai 100% yaitu dengan masing-masing prosentase 98,77%, 96,55%, dan 97,76%.

Tabel 5 Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase %	Tingkat Desentralisasi
2017	142.012.329.803,30	1.208.804.100.729,59	11,74%	Kurang
2018	85.244.781.020,12	1.283.332.114.446,26	6,64%	Sangat kurang
2019	87.416.745.768,32	1.286.926.426.852,06	6,80%	Sangat kurang
2020	70.239.542.600,36	1.187.893.025.414,77	5,91%	Sangat kurang
Rata-rata			7,83%	Sangat Kurang

Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	PAD	Transfer Pusat	Transfer Daerah	Pinjaman	Prosentase%
2017	142.012.329.803	908.016.520.000	0	16.372.047.294	15,36%
2018	85.244.781.020	986.201.808.000	14.484.957.954	15.448.324.342	8,38%
2019	87.416.745.768	959.058.275.736	13.302.776.007	14.618.235.384	8,85%
2020	70.239.542.600	858.011.526.000	15.099.703.544	15.047.902.986	7,91%
Rata-rata					10,06%

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Prosentase (%)	Kriteria
2017	119.098.060.635,33	142.012.329.803,30	83,86	Kurang Efektif
2018	66.182.995.394,25	85.244.781.020,12	77,64	Kurang Efektif
2019	62.047.535.548,64	87.416.745.768,32	70,98	Tidak Efektif
2020	65.952.353.499,95	70.239.542.600,36	93,90	Cukup Efektif
Rata-rata			80,12	Kurang Efektif

Tabel 8 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan daerah	Rasio Efisiensi Belanja %
2017	1.220.109.670.345,00	1.141.086.051.763,62	106,92
2018	1.221.688.581.122,00	1.236.846.999.491,25	98,77
2019	1.211.863.528.921,00	1.255.056.325.353,64	96,55
2020	1.149.687.557.091,39	1.175.919.370.060,51	97,76
Rata-rata			99,98

Tabel 9 Analisis Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja t_t	Realisasi Belanja t_{t-1}	Pertumbuhan/Penurunan %
2017-2016	1.026.337.555.210	1.206.814.074.106	(14,95%)
2018-2017	1.015.776.727.803	1.026.337.555.210	(1,03%)
2019-2018	972.650.862.223	1.015.776.727.803	(4,24%)
2020-2019	917.289.146.611	972.650.862.223	(5,70%)
Rata-rata			(6,48%)

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Pertumbuhan belanja pada tabel 9 mengalami penurunan pertumbuhan yang dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 6,48%. Ini berarti kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah kabupaten kupang sudah baik karena adanya penghematan anggaran tiap tahunnya. Hal ini dapat di lihat dari pertumbuhan tahun 2017-2017 dengan persentase 14,95%, pertumbuhan tahun 2017-2018 dengan persentase 1,03%, pertumbuhan 2018-2019 dengan persentase 4,24% dan pertumbuhan tahun 2019-2020 sebesar 5,70%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010-2019 yaitu 5,70% dan terendah pada tahun 2018-2017 yaitu 1,03%. Pertumbuhan belanja ini juga diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang positif yang artinya dalam jangka menengah dapat mempertahankan kesehatan fiskal daerah

Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan pemerintah daerah dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kategori sangat kurang dengan persentase rata-rata sebesar 7,83%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kontribusi PAD masih rendah dimana pemerintah belum mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan baik. Untuk melihat ketergantungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/ kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, yaitu dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Pemerintah Kabupaten Kupang belum mampu membiayai pembangunannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil, ini artinya otonomi daerah belum bisa dijalankan secara mandiri. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kupang

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari objek wisata. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada Kabupaten Jombang yang diteliti penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rika Viara kemampuan PAD jika dilihat dari segi varians sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dapat dijalankan secara mandiri sedangkan pada Kabupaten Kupang belum bisa karena PAD masih dalam kategori sangat kurang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Kupang terhadap bantuan ekstern (terutama dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat rendah dengan persentase sebesar 10,06% Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Tahun 2017-2020 menunjukkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 10,06% dengan skala kemandirian daerah rendah sekali. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Kupang sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil sama bahwa tingkat kemandirian keuangannya sangat rendah sehingga sangat membutuhkan bantuan ekstern yang sangat tinggi. Hasil peneliti terdahulu berbeda yaitu pada Kabupaten Jombang yang diteliti oleh Rika Viara yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah Kota Bitung yang diteliti oleh Gebriani Pirade Winer dikatakan mandiri karena PAD mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang ditentukan.

Rasio Efektifitas PAD

Efektifitas kinerja kerja Kabupaten Kupang kurang efektif karena rata-rata efektifitasnya kurang dari 100% yaitu 80,12%. Tahun 2020 realisasi PAD

Kabupaten Kupang masuk dalam kategori cukup efektif dengan hasil 93,90% hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah tidak mencapai target anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten kupang dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang belum mengoptimalkan realisasi penerimaan dengan baik. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rika Viara pada Kabupaten Jombang banyak yang mengalami tingkat rasio yang sangat kurang atau tidak efektif sama seperti Kabupaten Kupang yang terjadi pada tahun 2017-2019 dikatakan tidak efektif karena hasil dari rasio efektifitas dibawah rata-rata sedangkan pada tahun 2020 dikatakan cukup efektif karena hasil dari rasio mendekati nilai efektifitas sehingga itu yang membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi belanja dikategorikan efisien apabila rasio dicapai dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 diatas efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2017-2020 memiliki rasio efisiensi sudah efisien. Tahun 2019 pencapaian rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Kupang mencapai 1,83% atau sangat efisien. Rasio ini dikatakan efisien karena kinerja pemerintah dalam melakukan efisien belanja dilihat dari rasio, dimana semakin kecil hasil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Sehingga pada tahun 2019 dikatakan efisien karena memiliki hasil rasio yang kecil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rika Viara yang melakukan penelitian pada Kabupaten Jombang karena pada Kabupaten Kupang rasio efisiensinya sangat kecil sedangkan pada peneliti terdahulu rasio efisiensinya sangat besar.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja dilihat dari Analisis Pertumbuhan belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun 2017-2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 6,48%. Ini berarti kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah kabupaten kupang sudah baik karena adanya penghematan anggaran tiap tahunnya.

PENUTUP

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal sangat kurang (daerah belum mampu membiayai pembangunannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan dana bagi hasil) artinya otonomi daerah belum bisa dijalankan secara mandiri, karena rata-rata nilai sebesar 7,83%. Pada tahun 2017 persentasenya sebesar 11,74%, tahun 2018 persentasenya sebesar 6,64%, tahun 2019 persentasenya sebesar 6,80% dan pada tahun 2020 persentasenya sebesar 5,91%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kontribusi PAD masih rendah dimana pemerintah belum mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan baik.
2. Kemampuan keuangan BPKAD Kabupaten Kupang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) karena rata-rata nilai sebesar 10,06%. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Tahun 2017-2020 menunjukkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 10,06% dengan skala kemandirian daerah rendah sekali. Pada tahun 2017 persentasenya sebesar 15,36%, tahun 2018 persentasenya sebesar 8,38%, tahun 2019 persentasenya sebesar 8,85% dan pada tahun 2020 persentasenya sebesar 7,91%. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Kupang sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.
3. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari rasio efektivitas kurang efektif karena kontribusi yang diberikan hampir mencapai target yang ingin diraih dengan nilai rata-rata sebesar 80,12%. Dimana pada tahun 2017

persentasenya sebesar 83,86%, tahun 2018 persentasenya sebesar 77,64%, tahun 2019 persentasenya sebesar 70,98%, dan tahun 2020 persentasenya sebesar 93,90%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah tidak mencapai target anggaran.

4. Keuangan daerah Kabupaten Kupang dilihat dari rasio efisien tergolong sudah efisien dengan nilai rata-rata sebesar 6,48%. Dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 106,92%, tahun 2018 persentasenya sebesar 98,77%, tahun 2019 persentasenya sebesar 96,55%, dan tahun 2020 persentasenya sebesar 97,76%. Rasio ini dikatakan efisien karena kinerja pemerintah dalam melakukan efisien belanja dilihat dari rasio, dimana semakin kecil hasil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.
5. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun 2017-2020 mengalami pertumbuhan yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan 6,48%. Dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 14,95%, tahun 2018 persentasenya sebesar 1,03%, tahun 2019 persentasenya sebesar 4,24% dan tahun 2020 persentasenya sebesar 5,70%. Ini berarti kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah kabupaten kupang sudah baik karena adanya penghematan anggaran tiap tahunnya. Dengan adanya penghematan anggaran belanja ini diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan anggarannya untuk hal-hal yang terlibat langsung dengan kebutuhan masyarakat

Saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk menambah penerimaan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, peningkatan kinerja aparatur daerah agar tercipta manajemen organisasi yang lebih baik lagi, sarana dan prasarana harus diperbaiki untuk pelayanan publik yang lebih memadai serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Kupang.

2. Pemerintah Kabupaten Kupang harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendanaannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
3. Pemerintah Kabupaten Kupang harus meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Pemerintah Kabupaten Kupang diharuskan untuk tetap memperhatikan kinerja pemerintah sehingga kinerja yang dilakukan akan tetap baik bahkan semakin baik lagi.
5. Pemerintah Kabupaten Kupang dapat memaksimalkan anggarannya untuk hal-hal yang terlibat langsung dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abduh. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Manggu, S. A. R. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. *Jurnal Akrab Juara*, 4(1), 45-55.
- Patiroi, A. (2020). Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Economic Resource*, 3(1), 87-101.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.35794/emba.2.2.2014.4412>.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kota Dan Kabupaten.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Viara, R. (2018). Analisis Kemampuan PAD Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. In *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*. 2 (1). <https://doi.org/10.26533/senmakombis.v2i1.281>.
- Wenur, G. P. (2013). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1869>.